

Lampiran : Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0077 Tahun 2026
Tanggal : 25 September 2026

 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	Nomor SOP	e-0077 Tahun 2026
	Tanggal Pembuatan	25 September 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,  Arifin NIP. 197206221992031003
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	Judul SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2005	1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi; b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Arsip	1. Surat undangan sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik 2. Surat Kuasa 3. Daftar Informasi Publik (DIP) 4. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Pelanggaran terhadap SOP dapat berpengaruh pada hasil Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	1. Dokumen kegiatan 2. Daftar Informasi Publik 3. Daftar Informasi dikecualikan/rahasia	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		PPID Pelaksana (Sekretaris Kota)	Atasan PPID Pelaksana (Walikota)	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	8	9	10	11
1	Menerima surat undangan sidang ajudikasi nonlitigasi dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta			Surat undangan sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik	15	Disposisi	Terkait dengan SOP Surat Masuk
2	Menyusun konsep kronologis materi sidang ajudikasi nonlitigasi, rancangan Surat Kuasa dan menyiapkan data dukung			Disposisi	900	1. Konsep Nota Dinas kronologis materi sidang ajudikasi nonlitigasi 2. Rancangan Surat Kuasa 3. Daftar Informasi Publik (DIP) 4. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) 5. Informasi dan/atau Dokumen Pendukung	
3	Memeriksa konsep kronologis materi sidang ajudikasi nonlitigasi dan konsep Surat Kuasa untuk menghadiri sidang, Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada PPID Pelaksana untuk diperbaiki			1. Konsep Nota Dinas kronologis materi sidang ajudikasi nonlitigasi 2. Rancangan Surat Kuasa 3. Daftar Informasi Publik (DIP) 4. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) 5. Informasi dan/atau Dokumen Pendukung	300	1. Surat Kuasa 2. Kronologis Permohon Informasi Publik dan data dukung.	
	Menghadiri sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik			1. Surat Kuasa 2. Kronologis Permohon Informasi Publik dan data dukung.	-	Putusan sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa Informasi publik	1. Silang ajudikasi nonlitigasi PPID Pelaksana dapat didampingi oleh PPID Utama 2. Mengikuti SOP Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi provinsi DKI Jakarta
4	Melaporkan hasil putusan sidang tersebut kepada Atasan PPID Pelaksana dan mengarsipkan putusan sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa			Putusan sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa Informasi publik	300	Nota Dinas	
	TOTAL WAKTU				1515		

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

